

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Etnis Tionghoa di Indonesia memiliki sifat politis dan dinamis dalam arti mereka menaruh perhatian pada keadaan dan perkembangan politik disekitarnya. Meski demikian hanya sedikit dari mereka yang terlibat aktif dalam perpolitikan Indonesia. Sejarah mencatat bahwa pada masa Kolonial Belanda sampai masa Orde Lama, terdapat beberapa tokoh Tionghoa yang aktif dalam politik yang telah mengekspresikan pemikiran-pemikiran mereka dalam masalah sosial politik.

Bukti keterlibatan etnis Tionghoa di Indonesia, dapat dilihat dari eksistensi mereka dalam politik lokal dan pergerakan nasional, yakni munculnya organisasi, serikat dan atau partai politik yang didirikan dengan beranggotakan etnis Tionghoa; keberadaan jurnalis dan surat kabar etnis Tionghoa yang bermuatan politik; terdapatnya tokoh-tokoh politik etnis Tionghoa; membentuk tentara keamanan; hingga turut andil dalam mengukuhkan komitmen; persatuan bangsa, bahasa dan tanah air yng dikenal sebagai sumpah pemuda. Para tokoh etnis Tionghoa juga tercatat sebagai anggota dari BPUPKI dan PPKI.

Namun pasca meletusnya pemberontakan G30S 1966 dan beralihnya pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru, menyebabkan hak politik etnis Tionghoa semakin dibatasi. Dengan alasan keamanan nasional, Soeharto mengintensifkan berbagai usaha asimilasi budaya. Semua sekolah Cina dilarang, penggunaan bahasa Cina tidak dianjurkan dan penerbitan surat kabar dalam bahasa Cina tidak

diperbolehkan, serta etnis Tionghoa dihimbau untuk mengganti dengan memakai nama-nama yang terdengar seperti nama Indonesia yang tertuang dalam berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah.

Selama Orde Baru keterlibatan etnis Tionghoa dalam politik tanah air nyaris tidak pernah terdengar. Meski ada beberapa etnis Tionghoa yang terlibat dalam percaturan politik namun jumlahnya tidak seberapa atau sangat sedikit; baik dilembaga legislatif (DPR-DPRD) maupun eksekutif juga menteri yang duduk dalam kabinet Ampera jika dibandingkan jumlah mereka yang kira-kira menjapai 3% dari jumlah penduduk Indonesia. Hal ini disebabkan oleh karena semangat orang Tionghoa dipatahkan agar tidak terlibat dalam politik dengan berbagai cara, seperti; kebijakan diskriminatif, baik dalam bidang politik maupun sosial. Potensi politik etnis Tionghoa dibatasi dengan mengkonsentrasikan mereka dibidang ekonomi, bisnis, industri dan manufaktur.

Semasa Orde Baru berkuasa, etnis Tionghoa praktis dibatasi untuk terlibat dalam politik diseluruh wilayah NKRI, tanpa terkecuali dikota Medan. Etnis Tionghoa seakan enggan terlibat dan dilibatkan dalam kegiatan politik lokal dan pusat. Kelompok ini seakan diarahkan untuk bergelut dibidang ekonomi saja. Perlakuan diskriminatif politik berlaku selama masa pemerintahan Soeharto, seperti adanya peraturan ganti nama yang diatur dalam Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966; Impres No.14/1967 yang mengatur tentang agama/kepercayaan, tradisi/adat-istiadat Tionghoa yang pengamalannya hanya boleh dilaksanakan dan atau dirayakan dilingkungan sendiri atau bukan tempat umum; pemberian kode khusus pada KTP; pengenalan bukti kewarganegaraan

Republik Indonesia; belum lagi deretan berupa traumatik politik yang dialami oleh etnis Tionghoa dimasa Orde Baru, bahkan dibentuk suatu badan inteleghensi yang khusus bertugas mengawasi etnis Tionghoa, yaitu Badan Koordinasi Masalah Cina yang singkat BKMC. Hal ini menimbulkan sikap eksklusif, apatis bagi etnis Tionghoa dalam dunia politik.

Lengsernya Soeharto dan naiknya Habibie menandai babakan baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dinamai era Reformasi. Era Reformasi yang berlangsung sejak pertengahan tahun 1998 memiliki arti penting, tidak hanya bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan, tetapi juga bagi kalangan etnis Tionghoa Indonesia. Suasana baru ini sudah tentu mempengaruhi pemikiran politik etnis Tionghoa. Jika di era Orde Baru kelompok minoritas etnis Tionghoa tidak dapat dengan bebas berkecimpung didunia politik, maka sekarang mulai mendapatkan kebebasan sebagai mana etnis lain di Indonesia. Kalangan etnis Tionghoa bebas dan berhak memasuki bidang apa saja, termasuk: bidang birokrasi sehingga mereka dengan leluasa mencoba berprofesi sebagai guru, TNI/Polri atau jabatan birokrat lainnya, juga bidang kesenian sehingga mereka bebas menggelar pertunjukan barongsai bahkan mereka pun memiliki kebebasan yang sama dengan etnis lainnya untuk memasuki bidang politik yang di era Orde Baru ditabuhkan. Bukan hanya itu etnis Tionghoa juga bebas dan berhak mendirikan partai politik yang khusus mendidik kalangan Tionghoa atau masuk menjadi bagian dari partai politik lain yang lebih inklusif.

Sejak bulan Mei 1998, pemerintah Indonesia telah memberikan kebebasan kepada warga negara etnis Tionghoa untuk menyampaikan pendapat secara

terbuka, mendirikan partai politik, menyelenggarakan dan mempraktekan adat kebiasaan mereka secara terbuka. Sebagai mana bunyi konstitusi Indonesia yang menjamin hak-hak warga negara. Mulai era Reformasi berlaku pada tahun 1998 membawa iklim demokrasi dan keterbukaan termasuk terbukanya kesempatan yang sama bagi semua warga negara terhadap semua aspek kehidupan, khususnya aspek politik. Momentum ini dimanfaatkan dengan sangat baik oleh etnis Tionghoa untuk menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan hak mereka sebagai warga negara yang sah dihadapan hukum melalui saluran-saluran politik seperti yang tercantum dalam azas demokrasi politik.

Setelah sistem electoral dilakukan secara langsung baik untuk pemilihan Kepala Daerah dan pemilihan DPRD, memunculkan sebuah indikasi telah terjadi pergeseran politik yang dikembangkan oleh etnis Tionghoa. Kekuatan lobby maupun kekuatan finansial saat ini dirasakan tidak cukup untuk mengontrol berbagai kebijakan politik ditegah rumitnya dinamika politik lokal di kota Medan. Ada semacam keharusan bahwa etnis Tionghoa harus terlibat langsung dalam sistem politik sekaligus menanggalkan *image* (anggapan) sebagai etnis perantara.

Pada masa pemerintahan presiden K.H. Abdulrahman Wahid, pemerintah memberikan apresiasi kepada kelompok etnis Tionghoa, kemudian dilanjutkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, maka etnis Tionghoa merasakan bahwa inilah saat yang tepat untuk terjun ke dunia politik sebagai bagian dari partisipasi mereka sekaligus sebagai warga negara seutuhnya. Hal ini juga diperkuat dengan penunjukan dan pengangkatan Kwik Kiet Gie menjadi salah satu menteri dalam kabinet yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Terlepas dari itu setelah era Reformasi partai-partai lain pun mulai membuka diri terhadap etnis Tionghoa, seperti PAN, PKB, Partai Demokrat, Golkar, PDIP, dll. Hal ini turut menandai mulai membaiknya hubungan antar etnis di Indonesia setelah sekian lama terpolarisasi. Bukan hanya itu, partai politik juga semakin tumbuh subur dan bertambah banyak di bumi Nusantara, termasuk yang didirikan dan beranggotakan etnis Tionghoa seperti; Partindo, PPIB. Tercatat bahwa peserta pemilu legislatif pada pemilu pertama era reformasi (1999) sebanyak 48 partai politik yang telah lulus proses seleksi.

Beberapa tokoh etnis Tionghoa asal kota Medan yang terlibat dalam politik adalah Hashim, SE yang saat ini tercatat sebagai anggota DPRD sekaligus ketua Fraksi PDIP kota Medan. Hasyim yang telah duduk sebagai anggota dewan dalam 2 priode terakhir juga tercatat sebagai ketua DPC kota Medan. Selain Hasyim saat ini PDIP juga meloloskan satu nama lagi anggota DPRD dari etnis Tionghoa, dia adalah Wong Cun Sen yang terpilih dari dapim IV. Ada juga Lily MBA yang merupakan anggota DPRD dari Fraksi PPIB kemudian berafiliasi ke partai Gindra (2009). Selain Lily wanita lain yang berhasil menjadi anggota DPRD ialah Janlie, SE, Ak juga dari PPIB kemudian berafiliasi ke partai Gindra.

Selain nama ke empat tokoh tersebut diatas masih terdapat beberapa nama lagi dari etnis Tionghoa yang pernah menjadi anggota DPRD kota Medan, yakni A Hie, SH dari partai Demokrat dan beberapa etnis Tionghoa yang sempat menjadi caleg berturut-turut mereka ada adalah sebagai berikut: A Toni (PKDI), R Eddy (PPPI), Dr Rudy Wu (PKDI), Yan Loe (PRN). Pencapaian ini membuktikan besarnya potensi yang dimiliki oleh etnis Tionghoa untuk berdikari di bidang

politik, sekaligus sebagai upaya prmbuktian eksistensi dan jati diri sebagai warga negara Indonesia yang sah di hadapan hukum dan negara.

Bebagai organisasi Tionghoa juga tumbuh subur di Sumatra Utara khususnya di kota Medan. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan beberapa organisasi seperti: INTI (Perkumpulan Tionghoa Indonesia), PSMTI (Paguyuban Sosial Marga Tionghoa), PASTI (Paguyuban Suku Tionghoa Indonesia) yang diprakarsai dan beranggotakan etnis Tionghoa. Selain sebagai bukti eksistensi mereka, organisasi-oganisasi ini diproeksi juga sebagai satu strategi dalam upaya mendapatkan dukungan atau dengan kata lain sebagai sarana kampanye mencari masa dan simpati.

Sejak memasuki era Reformasi keterlibatan etnis Tionghoa dalam dunia politik dikota Medan semakin besar. Ini dapat dilihat dari terpilihnya mereka sebagai anggota DPRD kota Medan. Aspirasi politik mereka selalu terwakili dengan keberadaan mereka yang duduk sebagai anggota DPRD kota Medan. Bahkan pada priode tahun 2004-2009 terdapat empat wakil mereka di DPRD kota Medan. Dan saat ini (2014-2019) mereka meloloskan dua wakil untuk duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah kota Medan. Hal ini menunjukkan antusiasme atau eksistensi etnis Tionghoa yang cukup besar dalam politik pada era reformasi. Dengan demikian keterlibatan kelompok Tionghoa kota Medan dalam politik sejak awal reformasi hingga saat ini sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan jika dibandingkan dengan keterlibatannya di era Orde Baru, meski sebenarnya angka ini (2-4 orang) tergolong kecil atau rendah mengingat etnis Tinghoa menempati urutan 3 terbanyak di kota Medan dengan persentase kira-kira

sebesar 10,6% atau tepat dibawa suku atau etnis Jawa dan Batak yang masing-masing berjumlah 33% dan 20,9%.

Keberhasilan etnis Tionghoa menjadi pengurus partai politik dan menjadi anggota legislatif merupakan indikator eksistensi dan potensi etnis Tionghoa dalam bidang politik. Penulis menyadari bahwa fenomena ini tak serta-merta terjadi begitu saja, bahwa ada faktor latar belakang keterlibatan etnis Tionghoa dalam dunia politik. Menurut kesimpulan sementara, sedikitnya terdapat tiga faktor yang keterlibatan etnis Tionghoa dalam politik, yakni: era reformasi yang memungkinkan kaum minoritas Tionghoa dapat terlibat secara aktif dalam politik, faktor sejarah dan terakhir adalah faktor kekuasaan (ekonomi)

Dalam pemilihan umum legislatif pasca runtuhnya Orde Baru, dari tahun 1999 hingga 2014 dapat dilihat bagaimana antusias dan eksistensi masyarakat etnis Tionghoa dalam pesta rakyat 5 tahunan-an ini. Berbagai upaya mereka lakukan guna menarik simpati dan dukungan masyarakat luas untuk mendukung mereka dalam pemilihan umum. Mulai dari strategi memilih partai, mendirikan partai politik yang menjadi kendaraan politik, mekanisme menggerakkan masa, mendirikan organisasi, janji-janji atau program kerja saat masa kampanye hingga teknik kampanye.

Dari beberapa uraian tentang perkembangan partisipasi politik etnis Tionghoa yang mengalami pasang-surut dan dinamika politik diatas, membuat penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang faktor latar belakang keterlibatan atau motif warga etnis Tionghoa terlibat politik. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh politisi etnis Tionghoa

dalam rangka memenangkan pemilihan umum legislatif di Kota Medan (DPRD T.II). Sehingga penulis mengangkat judul penelitian: “Upaya-Upaya yang Dilakukan Politisi Etnis Tionghoa dalam Pemilu Legislatif Era Reformasi di Kota Medan.”

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika keterlibatan etnis Tionghoa dalam politik pada era Orde Lama
2. Latar belakang keterlibatan etnis Tionghoa dalam politik era Reformasi di kota Medan
3. Upaya-upaya yang dilakukan politisi etnis Tionghoa dalam pemilihan umum legislatif era reformasi di kota Medan.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan memaksimalkan hasil penelitian, maka peneliti membatasi masalah penelitian, yaitu: keterlibatan etnis Tionghoa dalam politik era Orde Lama, faktor latar belakang keterlibatan dan upaya-upaya politisi etnis Tionghoa dalam pemilu legislatif era reformasi di kota Medan.

1.4 Perumusan Masalah

Secara spesifik, pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keterlibatan etnis Tionghoa dalam politik pada era Orde

2. Apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi keterlibatan etnis Tionghoa dalam politik era Reformasi di kota Medan?
3. Bagaimana upaya-upaya pemenangan politisi etnis Tionghoa dalam pemilu legislatif era reformasi di kota Medan?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

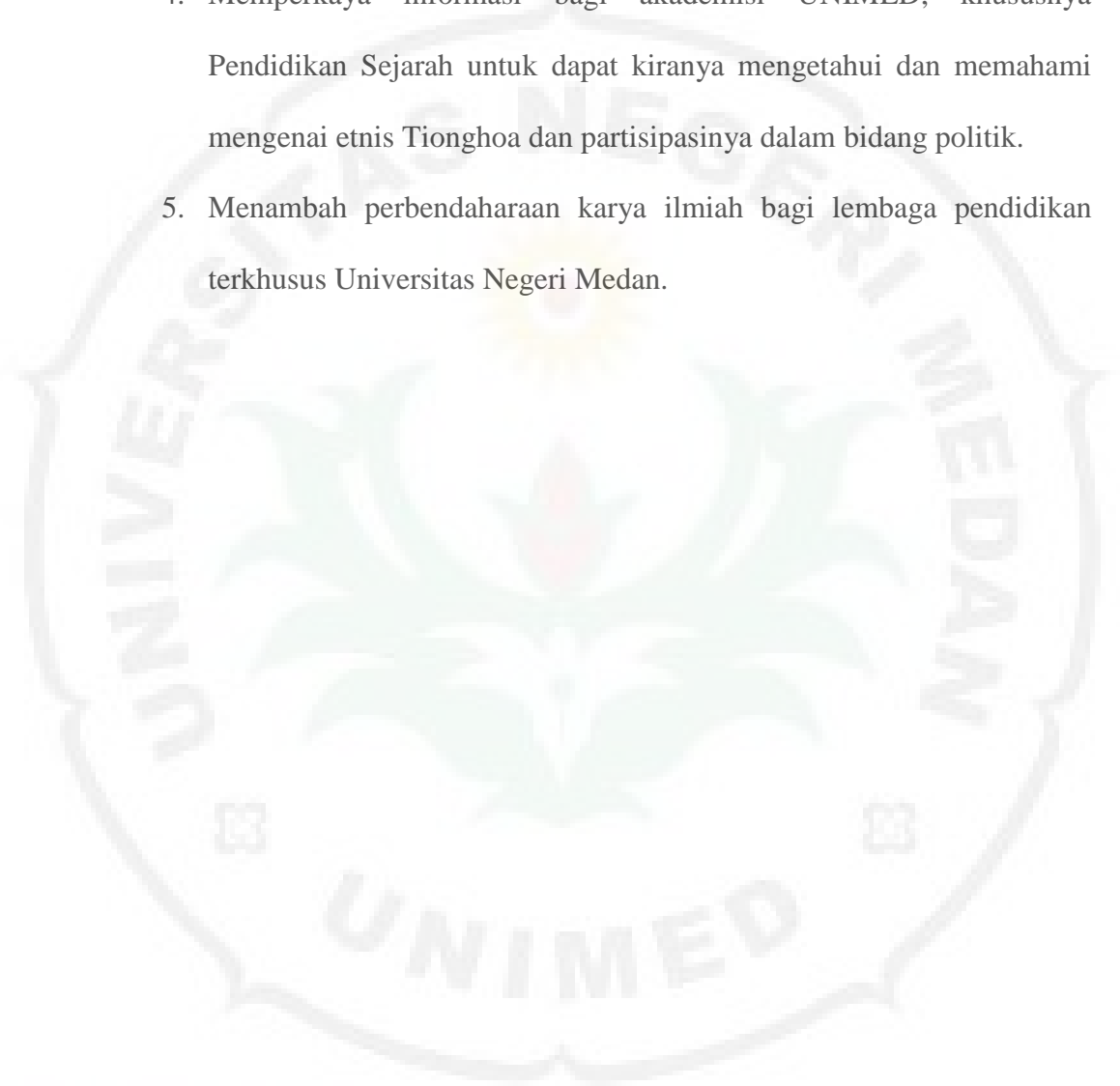
1. Untuk mengetahui latarbelakang keterlibatan etnis Tionghoa dalam politik sebagai calon legislatif dalam pemilu era Reformasi.
2. Untuk mengetahui berbagai upaya pemenangan politisi etnis Tionghoa dalam pemilihan umum legislatif di kota Medan.

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat:

1. Untuk menambah dan mengasah ilmu pengetahuan serta wawasan peneliti tentang latarbelakang keterlibatan dan upaya-upaya pemenangan etnis Tionghoa dalam pemilu Legislatif era Reformasi.
2. Untuk menambah pengetahuan bagi para pembaca baik dari kalangan intelektual muda seperti mahasiswa maupun masyarakat umum tentang latarbelakang keterlibatan dan upaya pemenangan politisi etnis Tionghoa dalam memenangkan pemilu era reformasi di kota Medan.
3. Sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi peneliti lain yang bermaksud mengadakan penelitian dalam masalah yang sama.

4. Memperkaya informasi bagi akademisi UNIMED, khususnya Pendidikan Sejarah untuk dapat kiranya mengetahui dan memahami mengenai etnis Tionghoa dan partisipasinya dalam bidang politik.
5. Menambah perbendaharaan karya ilmiah bagi lembaga pendidikan terkhusus Universitas Negeri Medan.



THE
Character Building
UNIVERSITY